



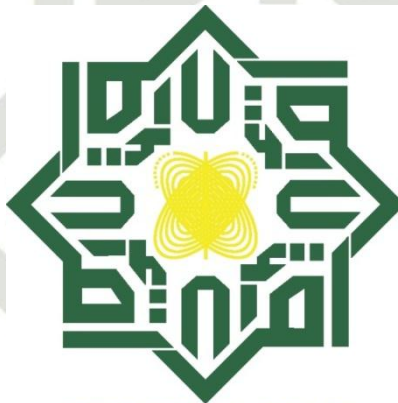
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR
INDONESIA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.101/2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI
KREDIT DAN SURETYSHIP**

(Studi Jaminan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**DIAN PERDANA
NIM. 11527100011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR
INDONESIA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.101/2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI
KREDIT DAN SURETYSHIP**

(Studi Jaminan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018)

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



Oleh

**DIAN PERDANA
NIM. 11527100011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul " *PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA KOTA PEKANBARI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 124/PMK.101/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI KREDIT DAN SURETYSHIP* "

Nama : DIAN PERDANA

NIM : 11527100011

Program Studi : IlmuHukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

SYAFRINALDI, SH, MA
NIP. 19810923 200604 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.101/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI KREDIT DAN SURETYSHIP (Studi Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018 yang ditulis oleh :

Nama : Dian Perdana
NIM : 11527100011
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, 31 Oktober 2018

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH
Sekretaris
Musrifah, SH, MH
Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA
Penguji II
Peri pirmsyah, SH., MH

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dian Perdana, (2019): *Pelaksanaan Surety Bond Oleh Pt Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri No 124/Pmk.101/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship (Study Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2008). ”*

Penelitian ini berjudul pelaksanaan surety bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 124/PMK.101/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship study pada jaminan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2018. Surety Bond atau juga disebut jaminan tender ini merupakan suatu produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya pengambil alihan potensi resiko kerugian yang mungkin dialami oleh salah satu pihak atas kepercayaan yang diberikannya pada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh mereka. Jaminan haya ada apabila kegagalan tersebut terjadi akibat kesalahan dari principal melaksanakan tugasnya sesuai isi kontrak kerja, Bila dikaji lebih dalam respon positif terhadap surety bond ini belum cukup kuat disebabkan oleh beberapa kasus ketidakpastian penyelesaian klaim surety bond itu sendiri dimana surety bond itu sendiri dalam penyelesaian klaim berpegang pada prinsip unconditional dimana pihak asuransi mencairkan ganti rugi berdasarkan tuntutan ganti rugi oleh pihak oblige tanpa meneliti sebab – sebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh principal

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian hukum sosiologis. Penelitian ini berlokasi di kompleks perkantoran Grand Sudirman Jalan Datuk Setia Maharaja Kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah 9 orang yang terdiri dari direktur operasional dan staf operasional Perusahaan Asuransi Ekspor Indonesia. Adaapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara dan studi pustaka. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan surety bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap jaminan pembangunan infrastruktur tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.010/2008 serta bagaimana penyelesaian klaim surety bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia pada pembangunan infrastruktur tahun 2008

Dalam hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan surety bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia kurang berjalan dengan efektif hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan pihak surety yang hanya melakukan monitoring melalui media telepon tanpa memilih untuk pergi kelokasi pembangunan guan mencegah terjadinya wanprestasi serta juga mengetahui sudah sejauh mana pembangunan itu berjalan dan apabila terjadinya klaim pihak PT Asuransi Ekspor Indonesia dalam pencairan klaim surety hanya bergantung pada tuntutan tagihan oleh oblige tanpa melakukan pengecekan kembali apakah tuntutan tersebut sudah seusai atau tidak sesuai dengan perjanjian antara pihak oblige dan princioal tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 124/PMK.101/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI KREDIT DAN SURETYSHIP (Study Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2008) .”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Aruansyah Aruan, dan Ibunda Arwanizar Harahap, yang telah membesarkan, mendidik serta selalu berdoa untuk kesuksesan, memberikan motivasi, bimbingan, perhatian, dan kepercayaan kepada Ananda selama ini. Kemudian bibi Isneinizar S.Sos serta adinda Dwina Umara, Dhio Anugrah, Dini Amalia Zahra dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan positif dan semangat kepada penulis

Bapak Prof. Dr. KH, Akhmad Mujahidin, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pendidikan di Universitas ini.

Bapak Prof. Dr. H. Hajar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan peulis untuk mengembangkan pendidikan di Fakultas ini.

4. Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah member kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di fakultas ini

5. Bapak Syafrinaldi, SH, MA. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ibu Musrifah, SH, MH., selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas bimbingan, nasehat dan arahan Ibu selama Ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis, semoga menjadi bekal dan berkah untuk penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Jumay Taty sebagai Branch Manager PT Asuransi Ekspor Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini,

Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2015, terutama IH1 dan teman-teman yang selalu menyemangati penulis, terimakasih.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Pekanbaru, November 2019
Penulis,

DIAN PERDANA
NIM. 11527100011

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat PT Asuransi Ekspor Indonesia	15
B. Visi dan Misi PT Asuransi Ekspor Indonesia	16
C. Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia.....	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pelaksanaan	19
1. Pengertian pelaksanaan/implementasi.....	19
B. Teori Asuransi	22
1. Pengertian Asuransi.....	22
2. Penggolongan dan jenis jenis Asuransi	25
3. Asas – asas Asuransi	27
4. Syarat sah perjanjian Asuransi	28
C. Teori Badan Hukum	29
1. Pengertian Badan Hukum.....	29
2. Bentuk bentuk Badan Hukum	30
3. Bentuk bentuk Badan Usaha	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	36
5. Hak dan Kewajiban Peseroan Terbatas	37
6. Tujuan Perseroan Terbatas	39
D. Asuransi Surety Bond	40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asuransi Surety Bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap Jaminan Pelaksanaan Pembangunan di Tahun 2018 Serta Hambatan dalam Pelaksanaan Asuransi Surety Bond	42
1. Mekanisme Pengajuan Surety Bond	43
2. Mekanisme Penilaian Sebelum Penerbitan	44
3. Mekanisme Penerbitan Surety Bond	47
4. Monitoring terhadap pelaksanaan proyek pembangunan hingga selesai	48
5. Hambatan Dalam Penjaminan Asuransi Surety Bond pada penjaminan pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2018	50
B. Penyelesaian Klaim Asuransi Surety Bond Pada PT Asuransi Ekspor Indonesia	51

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

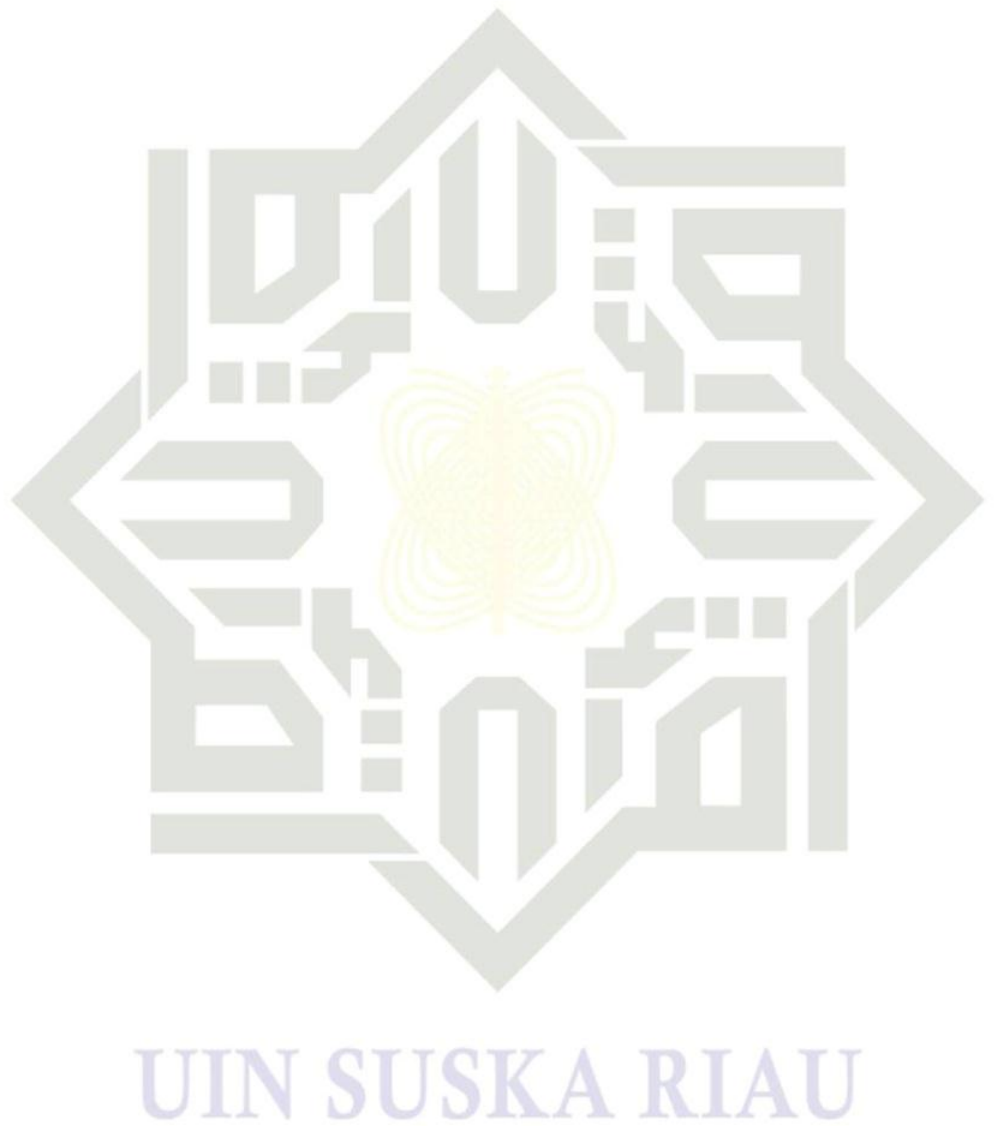
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	11
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia	18
---	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, pemerintah berperan besar dalam membangun Negara ke arah yang lebih baik termasuk di bidang ekonomi. Fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terkait dengan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Fungsi stabilisasi terkait dengan upaya menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa publik dan fungsi dan fungsi distribusi terkait dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa untuk publik, pemerintah melalui departemen – departemen yang ada menjalankan fungsi tersebut dengan melakukan proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah agar pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai oleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proyek – proyek yang diadakan oleh pemerintah melalui departemen – departemen pada umumnya terbagi menjadi dua yakni proyek konstruksi dan non konstruksi, proyek konstruksi umumnya berupa pembangunan fasilitas – fasilitas umum seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan lainnya. Sedangkan proyek Non konstruksi berupa pengadaan barang dan jasa guna keperluan operasional departemen terkait ataupun dalam rangka memenuhi visi dan misi pemerintah.

Proyek–proyek tersebut memiliki skala kompleksitas yang cukup besar. Misalnya untuk pembangunan jalan, diperlukan keahlian khusus serta modal yang besar dari kontraktor agar bisa melaksanakan proyek tersebut. Hal seperti inilah yang membuat kekhawatiran dari pihak pemerintah selaku pemilik proyek (*oblige*) terhadap kinerja dan kontraktor (*principal*) yang mengerjakan proyek – proyek tersebut atau tidak. Salah satu aspek penting adalah jaminan yang tersedia untuk pengerjaan proyek tersebut¹.

Di Indonesia sebelum tahun 1978 lembaga jaminan yang mirip surety bond selama ini adalah bank garansi. Barulah pada tanggal 6 Desember 1978 pemerintah memberi peluang melalui Peraturan pemerintah RI, No.34 tahun 1978 untuk Asuransi Kerugian Jasa Raharja melakukan perluasan usahanya dari asuransi wajibnya di bidang pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun perluasan usaha yang dimaksud adalah pemberian jaminan dalam bentuk surety bond².

Menteri keuangan sebagai pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia, dari awal-awal sebenarnya telah menyadari bahwa konsekwensi

¹ Mulhadi, *Dasar – dasar Hukum Asuransi*, (Depok, Rajawali, 2017), h, 85.

² Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dari penerbitan surety bond tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, izin untuk menerbitkan surety bond dibatasi secara ketat dan malah pada awalnya Peraturan pemerintah RI, No.34 tahun 1978 hanya diberikan pada PT. Persero Asuransi Jasa Raharja, yang dalam perkembangannya kemudian izin penerbitan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK RI) No. 761 / KMK.013 / 1992 diperluas kepada 20 perusahaan asuransi, yang kemudian berdasarkan Surat Direktur Asuransi No. S 2272 / DK / 2001 tanggal 16 Mei 2001 yang ditujukan ke Pertamina menyatakan adanya 22 perusahaan asuransi yang berhak untuk menerbitkan surety bond.

Namun Ketentuan diatas kini tidak berlaku setelah dikeluarkannya kepres No. 18 tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Kepres ini kemudian dilengkapi dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas Nomor KEP-54/A/2002 dan Nomor KEP.247/M.PPN/04/2002 atas perubahan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas No. S-42/A/2000³ dan No.S-2262/D.2/05/2000 tertanggal 3 Mei 2000 dan, dimana isi Keputusan Bersama Menteri tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus dari perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bonds*) dan harus direasuransikan kepada perusahaan asuransi/reasuransi yang bonafid.

Surety Bond atau juga yang disebut jaminan tender ini merupakan salah satu bentuk alternatif yang dikeluarkan dari perusahaan asuransi untuk

³Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 486/KMK.04/2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin pemilik proyek (*obligee*) supaya hak-haknya terlaksana dengan baik dan benar. Seperti yang di kemukakan oleh Ricardo Simanjuntak di artikelnya yang berjudul “Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia.”

Mengenai ketentuan penyelenggaraan yang meliputi pemasaran surety bond hingga pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau oblige akibat ketidakmampuan atau kegagalan atatu tidak terpenuhnya kewajiban debitur atau principal ini diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008.⁴

Surety Bond merupakan suatu produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya pengambilalihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak atas kepercayaan yang diberikannya pada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh mereka.

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan surety Bond (PT Asuransi Ekspor Indonesia) sebagai penjamin kegiatan proyek yang meliputi: hubungan hukum para pihak dalam perjanjian surety bond yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia, ruang lingkup jaminan dalam surety bond yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia serta, cara/prosedur untuk memperoleh jaminan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian surety bond serta adanya upaya para pihak apabila principal melakukan wansprestasi.

PT Asuransi Ekspor Indonesiaselaku surety berkewajiban untuk mengatasi kerugian *obligee* akibat kewansprestasian principal sebesar nilai

⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan yang telah disepakati, akan tetapi pihak obligee sebelumnya telah memberikan fakta – fakta tentang kewansprestasian principal kepada pihak PT Asuransi Ekspor Indonesia selaku *surety*, bukti tersebut berupa surat teguran I, II, dan III. Setelah kerugian *obligee* tersebut terbayarkan, maka sesuai dengan Agreement Of Indemnity To Surety (Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety) dan hak subrograsi (pasal 1840 KUHPerdato)⁵ yang dimiliki oleh surety (PT Asuransi Ekspor Indonesia) maka principal wajib melakukan *recovery*/ pengembalian kepada PT Asuransi Ekspor Indonesia(surety) sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada *obligee*.

Namun di dalam prakteknya penggunaan Surety bond tampak kurang populer dalam masyarakat dunia usaha. Banyak pihak, terutama investor asing, yang belum menunjukkan keyakinan terhadap kepastian penjaminan dengan menggunakan produk asuransi tersebut.

Bila dikaji lebih dalam, respon positif yang belum begitu kuat muncul dari kalangan pelaku usaha terhadap penggunaan surety bond tidak selalu disebabkan karena belum gencarnya sosialisasi ataupun pengiklanan akan tetapi lebih disebabkan oleh beberapa kasus ketidakpastian penyelesaian klaim surety bond itu sendiri.

Penerbitan Surety Bond akan dikenakan biaya yaitu *service charge*, yaitu biaya pelayanan dan tujuannya melindungi pemilik proyek (*obligee*) sehingga apabila kontraktor gagal melaksanakan tugasnya maka surety company memberikan jaminan. Manfaat adanya Surety Bond serta apakah

⁵Pasal 1840 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan asuransi yang menjamin bonafid, baru diketahui pada saat terjadinya klaim.

Jaminan hanya ada apabila kegagalan tersebut terjadi akibat kesalahan dari kontraktor melaksanakan tugasnya sesuai isi kontrak kerja. Jika tidak dapat dipenuhi isi kontrak adalah sebagai akibat dari kesalahan *Principal*, maka surety company wajib mencairkan jaminannya. Sehubungan dengan pembayaran klaim kepada *obligee*, maka *surety company* berhak untuk menuntut pembayaran ganti rugi tersebut kepada *principal* atau yang lazim dikenal dengan nama *recovery*. Pada saat terjadinya klaim inilah akan diketahui apakah waktu memberikan jaminan para underwiter sudah menganalisa factor -faktor yang perlu dipersyaratkan dalam perjanjian dengan *oblige*.

Eksistensi surety bond dalam perjanjian pembangunan adalah sebagai salah satu bentuk jaminan pekerjaan yang cukup berperan dalam perjanjian pembangunan yang dimana :

1. Hubungan hukum dalam perjanjian surety bond terjadi antara 3 (tiga) pihak yaitu Perusahaan Asuransi (*surety company*), Terjamin (pelaksana proyek/*Principal*) dan Penerima Jaminan (Pemilik proyek/*Oblige*)

Namun ternyata dalam praktiknya di dalam pembuatan perjanjian Surety Bond hanya pihak Perusahaan asuransi dengan terjamin, sedangkan antara penerima jaminan dan perusahaan asuransi tidak ada hubungan secara langsung. Jadi penerima tidak turut serta di dalam penandatanganan Surety Bond itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencairan klaim Surety Bond berdasarkan adanya pernyataan tuntutan ganti rugi dalam bentuk tertulis oleh *Oblige* (pelaksana Proyek) hal ini menyebabkan ketidakpastian Pencairan Surety Bond, hal tersebut menjadi permasalahan bagi *Principal* (Pelaksana Proyek)

Prosedur penanganan klaim ini tergantung apakah jaminan tersebut didasarkan atas dasar unconditional ataupun conditional. Jika didasarkan atas prinsip unconditional, maka penyelesaian klaimnya berpegang pada prinsip ganti rugi. Jika jaminannya bersifat conditional harus meneliti sebab – sebab tidak terpenuhinya perjanjian.

Suretybonds sebagai produk asuransi yang lebih mengedepankan ganti rugi atau yang lebih dikenal dengan nama unconditional, yaitu pihak *Obligee* diminta memberikan data-data kerugian yang akan diajukan sebagai ganti rugi klaim kepada Surety. Hal ini berbeda dengan Bank Garansi yang lebih berpegang kepada prinsip conditional yang berarti bank diharuskan untuk membuktikan kerugian yang diderita *Obligee*.

Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya kasus pencairan surety bond tersebut sering kali sangat bergantung kepada tuntutan ganti rugi oleh pihak *oblige* tanpa menimbang apakah kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan oleh *principal* sesuai dengan perjanjian antara *oblige* dan *principal* serta apakah ganti rugi yang di ajukan oleh *oblige* sesuai dengan kerugian yang dilakukan oleh pihak *principal*. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN ASURANSI SURETY BOND PADA PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA KOTA**



PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 124/KMK.101/2008 TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI SURETY SHIP (STUDI JAMINAN PROYEK PEMBANGUNAN TAHUN 2018”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi tentang Pelaksanaan Surety Bond di PT Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Terhadap Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2018 dimana penulis mengambil sample pada Penjaminan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 3 Kota Pekanbaru – Metro (STA 80+000 s/d 109+000).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan surety bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap jaminan pembangunan di kota pekanbaru tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 serta hambatan yang dihadapi pihak Asuransi Ekspor Indonesia pada Pelaksanaan Asuransi Surety Bond?
2. Bagaimana Penyelesaian Klaim Surety Bond oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia pada pembangunan infrastruktur di Tahun 2018?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan surety bond yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia Terhadap Pembangunan infrastruktur pada tahun 2018, Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis, sehingga data yang diperoleh adalah data yang berdasarkan kenyataan/realita yang terjadi dilapangan (PT Asuransi Ekspor Indonesia) tentang bagaimana bentuk pelaksanaan surety bond sebagai penjamin kegiatan proyek serta upaya yang ditempuh oleh pihak PT Asuransi Ekspor Indonesia terhadap kewanprestasian principal apakah sudah tercermin sebagai penjamin dan sesuai dengan cerminan perjanjian penanggungan yang dianutnya.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada pelaksanaan surety bond dan menganalisis bagaimana PT Asuransi Ekspor Indonesia mengatasi hambatan dalam pelaksanaan surety bond tersebut.

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Penelitian**

- a. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat maupun pengusaha agar mengetahui pelaksanaan surety bond terhadap penjaminan pelaksanaan pembangunan.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Asuransi Surety Bond.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara pada PT Asuransi Ekspor Indonesia tentang Pelaksanaan Surety bond pada proyek pembangunan infrastruktur tahun 2018.⁶

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai data yang diperoleh kemudian di analisa. Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kompleks perkantoran Grand Sudirman jalan Datuk Setia Maharaja kota pekanbaru. Penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena masalah tersebut terjadi di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Jalan Datuk Setia Maharaja Kota Pekanbaru.

⁶ <http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>.

⁷ Nazir, Moh..*Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, h, 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek Penelitian ini adalah PT Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru.
- Objek penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur pada tahun 2018.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah Total Sampling. Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada⁸.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sample	Persentasi
1	Direktur Operational	1	1	100%
2	Divisi Asuransi Kredit dan Penjaminan	8	8	100%

5. Sumber Data

- Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan Observasi dan Wawancara.
- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang – undangan dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet, ke –

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung lapangan untuk melihat secara jelas apa yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak PT Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru.
- c. Studi Pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini⁹.

7. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kuantitatif yaitu setelah data terkumpul, data – data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori – kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori – kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut. kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti¹⁰.

8. Metode Penulisan

Setelah data–data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan metode – metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah– kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

⁹ Suratman , Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.

¹⁰ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah – kaidah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Metode Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

G. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Hukum.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Didalam Bab ini penulis akan memberikan gambaran umum sejarah berdirinya PT Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang berisikan prinsip – prinsip yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, batal dan pembatalan perjanjian, perjanjian asuransi, asuransi surety bond berdasarkan peraturan meteri keuangan nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

124/PMK.101./2008 Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Surety.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan Pelaksanaan Surety Bond terhadap Penjaminan Pelaksanaan Proyek Pembangunan pada Tahun 2018 oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan dalam menyelenggarakan surety bond

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi Kesimpulan Dan Saran



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT Asuransi Ekspor Indonesia

PT Asuransi Asei Indonesia (Asuransi Asei) merupakan hasil transformasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidang asuransi dan jaminan. PT Asuransi Ekspor Indonesia hadir menjadi perusahaan asuransi yang lebih dinamis dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Secara legal (*de jure*), PT Asuransi Asei Indonesia berdiri pada 9 oktober 2014 berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Marthin Aliunir, SH dan memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-29156.40.10.2014 tertanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Ijin Usaha Asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-121/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Namun, secara *de facto* bisnis Asuransi Asei sudah berlangsung sejak 1985 melalui PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1983, yang bergerak di bidang asuransi dan jaminan untuk mendukung pengembangan ekspor non-migas nasional. Seiring dengan

Kebutuhan nasional¹¹, pemerintah selaku pemegang saham , melakukan transformasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (persero) dengan call brand Indonesia Re. sedangkan Bisnis Asuransi dan Jaminan dilaksanakan Oleh PT Asuransi Asei Indonesia.

¹¹www.Asei.co.id diakses pada 18 juni 2018, 21:15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT Asuransi Asei Indonesia didirikan dengan modal dasar Rp 800 miliar dan modal disetor Rp 550 miliar. Pemegang sahamnya adalah PT Asei Re (persero) dengan komposisi 99,998% dan sisanya 0,002% dimiliki oleh koperasi Pegawai PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero). Pada 31 Oktober 2014 melalui surat Nomor S-658/NB.211/2014. OJK memberi izin pengalihan portofolio Bisnis Direct dan Reasuransi PT Asei Re kepada PT Asuransi Asei Indonesia, dan pada 17 Desember 2014 spin off mendapat persetujuan efektif dari RUPS PT Asei Re.

PT Asuransi Ekspor Indonesia (persero) cabang Kota Pekanbaru bertempat di Komplek Pekantoran Grand Sudirman Blok A No 6, JL. Datuk Setia Maharaja, Pekanbaru, Tengkerang Selatan, Bukit Raya, Pekanbaru City, Riau kode pos 28125 Perusahaan Asuransi Ekspor Indonesia cabang kota pekanbaru bergerak setelah dikeluarkannya izin dari Surat Dirjen Perbendaharaan No : S-8190/PB/2008 dan surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II dari Otoritas Jasa Kerja (OJK) Nomor : 5-595/NB.2/2018 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum.¹²

B. Visi dan Misi PT Asuransi Ekspor Indonesia

1. Visi Perusahaan :

Menjadi perusahaan asuransi keuangan yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui dan terpecah di Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi.¹³

¹² Dokumen PT ASEI, Kantor Cabang Pekanbaru, 2018.

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

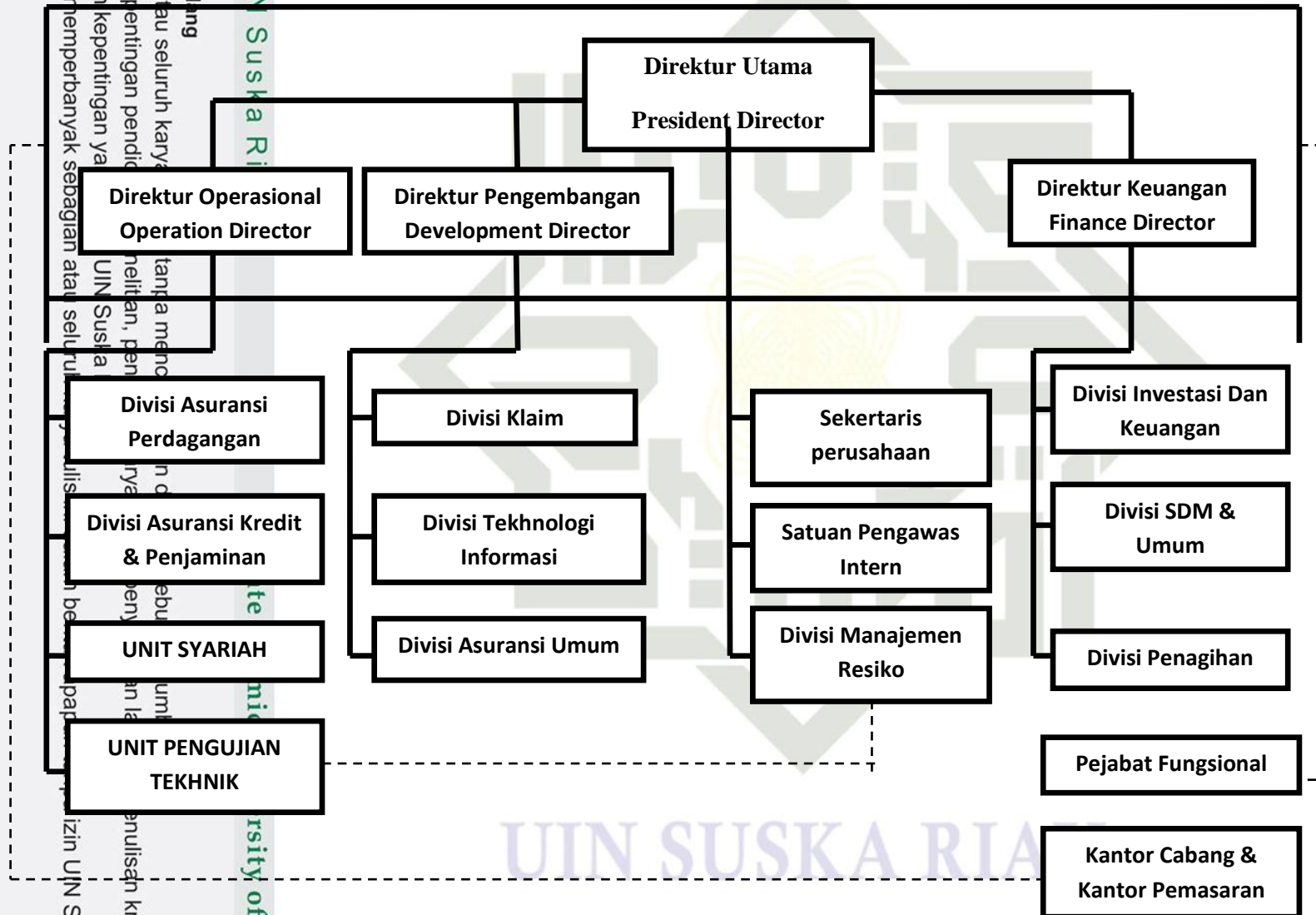
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Perusahaan :

- a. Berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan prima serta bernilai tambah pada stakeholder melalui inovasi produk pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan.
- b. Memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui Asuransi Keuangan, Asuransi Umum, dan Asuransi Syariah
- c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia.¹⁴

¹⁴*Ibid.*

C. Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan / Implementasi

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.¹⁵ Secara istilah pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan, Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Sedangkan menurut George R Terry (1986) menjelaskan bahwa, pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut. Dari pendapat ini disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah upaya untuk menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melalui pengarahan

¹⁵ eprints.uny.ac.id/18666/4/4.%20Bab%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019 07:05
repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 07:08

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemotivasian agar kegiatan dapat berjalan secara optimal dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Pengertian-Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksana bermuara pada aktivitas. Adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksana bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan. Siapa yang melaksanakan ditempat mana pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan atau di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

¹⁶<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpls/article/download/.../2238> diakses pada tanggal 30 May 2019, 07:30

Faktor – faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apalagi jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terprnuhinya jumlag staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna melaksanakan tugas sebagai tnggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi Program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Biokrasi, yaitu SOP (Standart Operating Procedures), yang mengatur tata aliran pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang – kurangnya terdapat tiga unsur mutlak yaitu :

- a. Adanya Program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program pemohonan perubahan dan peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

B. Teori Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa belanda *Verzekering* berarti pertanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan¹⁷.

Di dalam KUHD pada pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan

¹⁷Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, Sinar Grafika, 2011), h, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggantian kepadanya karena suatu kerugian¹⁸, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Berdasarkan definisi Pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan bahwa adanya unsur – unsur sebagai berikut :

a. Pihak – Pihak.

Subjek asuransi adalah pihak – pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang di asuransikan.¹⁹

b. Status Pihak – Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan Badan Hukum. Dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (persero) atau koperasi. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang di asuransikan.

c. Objek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebutkan premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin

¹⁸ Prakoso,Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta,PT Rineka Cipta,2004), h, 1.

¹⁹ *Op.cit* h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai oleh pihak – pihak. Penanggung bertujuan pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, berupa akta yang disebut Polis. Polis ini merupakan satu satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karna persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, Penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi *evenemen*, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian.²⁰ Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUH, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut :

- a. Penanggung dan tertanggung
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
- d. Tujuan yang ingin dicapai
- e. Resiko dan Premi
- f. Evenemen dan ganti kerugian
- g. Syarat syarat yang berlaku
- h. Bentuk akta Polis asuransi

Penggolongan dan Jenis – Jenis Asuransi

Kitab Undang–undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas mengenai penggolongan asuransi. Hal ini berlainan Dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Negeri Belanda yang secara tegas menggolongkan asuransi menjadi dua golongan yaitu:²¹

²⁰ *Ibid* h.9.

²¹ Sastrawidjaja, Suparman, *Aspek–aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung, P.T..Alumni, 2003), h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Schadeverzekening* (asuransi kerugian)

Asuransi kerugian (*Schadeverzekening*) adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri asuransi kerugian, antara lain kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Adapun yang termasuk dalam golongan asuransi kebakaran yaitu:

- 1) Asuransi Kebakaran
- 2) Asuransi laut
- 3) Asuransi tanggung Jawab
- 4) Asuransi Kendaraan Bermotor
- 5) Asuransi Pengangkutan baik di darat maupun di sungai

b. *Sommenverzekening* (asuransi jumlah)

Asuransi jumlah (*sommenverzekening*) ada suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah, antara lain :

- 1) Kepentingannya tidak dinilai dari uang
- 2) Tidak berlaku prinsip identitas
- 3) Tidak berlaku subrogasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang termasuk jenis dari Asuransi jumlah yaitu adalah asuransi Jiwa. Disamping penggolongan tersebut di atas, juga terdapat golongan asuransi dilihat dari kriteria da tidaknya kehendak bebas dari para pihak²², yaitu :

- 1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya. Hal demikia mengandung arti bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar.

- 2) Asuransi wajib

Asuransi wajib yang terbentuk karena diharukan oleh suatu peraturan – perundangan. Dalam beberapa jenis golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilakukan.

3. Asas – Asas Asuransi

Adapun yang termasuk asas - asas asuransi²³ yaitu :

- a. Asas Indemtitas

Adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asa yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri.

- b. Asas Kepentingan

Asas kepentingan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus ,mempuyai kepentingan yang diharuskan

²²Ibid h.86.

²³Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta,Sinar Grafika, 1992),h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas Kejujuran

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

d. Asas Subrogasi

Asas subrogasi sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUH Dagang adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas identitas.

4. Syarat sah perjanjian asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat – syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian. Dalam perjanjian asuransi ini berlaku ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian yaitu²⁴ :

a. Kesepakatan

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak – pihak dalam hal ini penanggung dan tertanggung mengenai pokok perjanjian asuransi sejak saat perjanjian mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

b. Kewenangan

Kewenangan itu ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subjektif artinya sudah dewasa yakni mencapai 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (Pasal 1330 KUH Perdata), sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian,

²⁴Ibid h.96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaannya sendiri.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan (asuransi kerugian), dapat pula berupa jiwa dan raga manusia (asuransi jiwa). Objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas dan pasti. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk kemungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

d. Suatu sebab yang halal (kausa yang halal)

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang – undang ialah “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal 1337 KUHPdt).

C. Teori Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan Hukum adalah suatu perkumpulan orang – orang yang mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Badan Hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala riil, sesuatu yang dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, batu dan segalanya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggota – anggotanya.²⁵

Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu badan Hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu :

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota – anggotanya.
- b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota – anggotanya.

2. Bentuk– Bentuk Badan Hukum

Suatu badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu mempunyai harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantara pengurusnya. Badan perkumpulan yang demikian disebut Badan Hukum²⁶. Menurut jenisnya badan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:²⁷

²⁵ Soeroso,R,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta,Sinar Grafika,2013) ,h.238 .

²⁶ Asyhadie Zaeni, Rahman Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) h.63

²⁷ Anggraini,Lysa,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru,Suska Press,2014), h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Badan Hukum Privat

Badan Hukum Privat yaitu badan hukum yang di dirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dalam badan hukum itu. Badan hukum tersebut merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga dan lain-lain, sesuai dengan/menurut hukum yang berlaku secara sah. Bentuk serta susunannya diatur oleh hukum privat.²⁸ Menurut tujuannya Badan hukum privat dibagi/dibedakan dalam:²⁹

- 1) Perserikatan dengan tujuan tidak materialistis / amal
- 2) Perserikatan dengan tujuan memperoleh laba

b. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik yaitu badan hukum yang di dirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan public (orang banyak) atau Negara pada umumnya. Badan Hukum ini merupakan badan hukum Negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan oleh eksekutif, pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.³⁰

²⁸ *Ibid* h.58.

²⁹ *Op.cit* h.240.

³⁰ *Op.cit* h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk – Bentuk Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/ keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal kenyataannya berbeda. Badan Usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah Faktor – faktor produksi. Bentuk- bentuk hukum badan usaha yang telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang – undangan yaitu:³¹

a. Persekutuan Perdata

Menurut RT, Sutandaya R Hadikusuma dan Sumantoro yang dimaksudkan persukutuan perdata adalah suatu persekutuan dibentuk atas suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Berdasarkan pengertian tersebut, persekutuan perdata pada intinya mengandung unsur-unsur :

- 1) Persekutuan perdata adalah perjanjian (Kontrak)
- 2) Adanya pemasukan sesuatu (*inbreng*) kedalam perusahaan yang dapat berupa uang, barang atau benda, tenaga baik fisik atau pikiran.
- 3) Adanya pembagian keuntungan³².

³¹ Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016), h.33.

³² Sardjono Agus, *Pengantar Hukum dagang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Persekutuan Firma

Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Menurut Pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma ialah tiap – tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga³³. Dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁴ :

1) Menjalankan usaha bersama

Menjalankan usaha bersama atau menjalankan perusahaan bersama merupakan unsur mutlak dari suatu firma.

2) Menggunakan nama bersama

Nama bersama ini mengandung makna bahwa nama dari persekutuan perdata tersebut adalah nama atau nama – nama dari mereka yang ikut serta dalam firma atau yang disebut sekutu.

3) Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan.

Maksudnya adalah disamping harta kekayaan firma, harta kekayaan pribadi masing-masing pendiri juga dapat dinakan untuk memenuhi kewajiban – kewajiban firma terhadap pihak ketiga.

³³Kansil,C.S.T., Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,2008,h.76.

³⁴*Ibid* h.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Persekutuan Komanditer

Bentuk persekutuan ini tidak diatur secara tersendiri dalam KUH Dagang melainkan digabungkan bersama dengan peraturan – peraturan mengenai persekutuan firma. Pasal 19 KUH Dagang menyebutkan, bahwa persekutuan komanditer atau cv (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab soldier) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschietter*) pada pihak yang lain.³⁵

Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu :

- 1) Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan
- 2) Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.

d. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze vennootschap (NV). Istilah “terbatas” di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

³⁵ *Op.cit* h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Koperasi

Arifin Chaniago menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Np 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang No 12 Tahun 1967. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

f. Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Badan usaha milik Negara ini memiliki dua jenis yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum.

4. Dasar Hukum Pembentukan Perseroan Terbatas (PT)

Dasar hukum pembentukan suatu perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut³⁶ :

- a. Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- b. Undang – Undang No 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
- c. Undang – Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal berkaitan dengan pembentukan PT Terbuka
- d. Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas
- e. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas
- f. Keputusan Menkumham Republik Indonesia M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi/badan hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia
- g. Surat Edaran jendral Administrasi Hukum No.C1.HT.01.01.10-03 tentang berakhirnya sistem manual terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- h. Keputusan jenderal administrasi, hukum Umum No.C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 1 dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 11 untuk perseroan terbatas tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶<https://www.notarisdanppat.com> > Hukum & Notaris diakses tanggal 31 July 2019 03:05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-1.HT.01.01 pada tahun 2003 tanggal 22 januari 2003 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) tentang perseroan ter, yang dimaksud dengan direksi dalam perseroan terbatas adalah organisasi perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai anggaran dasar.

Dari pengertian pada UUPT tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanggung jawab direksi cukup besar. Namun Direksi juga memiliki kewenangan antara lain³⁷ :

- a. Memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut.
- b. Direksi juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur dan juga yang tetera dalam anggaran dasar perusahaan.

³⁷[https://prolegal.id/2017/02/14/apa-saja-hak-dan-kewajiban-direksi/diakses pada tanggal 31 Maret 2019,03:11](https://prolegal.id/2017/02/14/apa-saja-hak-dan-kewajiban-direksi/diakses%20pada%20tanggal%2031%20Maret%202019,03:11).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain wewenang tersebut, hak yang dimiliki direksi antara lain:

- a. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
- b. Direksi berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.
- c. Direksi berhak mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan.
- d. Direksi berhak untuk member kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut.
- e. Direksi berhak berjalan menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, tentunya dengan pembatasan sesuai yang tertera dalam anggaran dasar.
- f. Direksi berhak untuk – untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu RUPS atau dewan komisaris
- g. Menyusun rancangan penggabungan peleburan dan pelebaran dan pengambil alihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapat keputusan.

Dan kewajiban anda seorang direksi adalah :

- a. Direksi berkewajiban untuk melakukan pendaftaran akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Direksi wajib mengadakan dana menyimpan daftar pemegang saham di daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari pemegang saham.
- c. Direksi dengan kad baikberkewajiban untuk menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.
- d. Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan terkait perseroan.
- e. Direksi wajib menyusun rancangan penggabungan peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan sebuah keputusan.

6. Tujuan Perseroan Terbatas

Tujuan Perseroan Terbatas adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengajar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik dipasar dalam negeri maupun international. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai persero yang bersangkutan sehingga akan member keuntungan dan nilai persero yang bersangkutan sehingga akan member manfaat yang optimal bagi pihak pihak tersebut³⁸.

³⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Persada, 2017, h. 260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Asuransi Surety Bond

Surety Bond adalah salah satu bentuk jaminan yang diterbitkan oleh lembaga penjaminan, untuk melindungi *Obligee*/ pemilik dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan karena kegagalan (wan prestasi) oleh pemborong, pemasok (*Supplier*), konsultan yang disertai kepercayaan menangani suatu proyek, Surety Bond dapat dimanfaatkan oleh ketiga golongan diatas.

Surety bond sebagai yang disebut dalam pertimbangan P.N Jakarta Selatan No.047/pdt/1986/PN.Jkt Sel., tanggal 20 november 1986 sebagai berikut : surety bond adalah bentuk perjanjian dimana surety Company dengan Principal/kontraktor secara bersama – sama memberikan jaminan bagi kepentingan pihak ketiga (*Obligee/bouwheer*), yakni apabila pihak yang dijamin (*Principal/Kontraktor*) oleh sesuatu hal/sebab tidak/gagal/lalai memenuhi kewajibannya terhadap *Obligee/bouwheer* (melakukan Wanprestasi), dan apabila principal harus membayar Ganti rugi kepada *Obligee/bouwheer*, dan apabila *Principal* tidak dapat/tidak mampu membayar ganti rugi ini, maka surety akan membayar kepada *Obligee* kerugian – kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian/kegagalan. Principal tersebut, sampai jumlah maksimum nilai jaminan yang merupakan suatu bagian (prestasi) tertentu dari nilai proyek yang ditetapkan oleh *Obligee* atau pemilik proyek untuk ditutup jaminannya dengan suatu bond.

Bisnis Surety Bond di Indonesia baru mulai diperkenalkan sejak tahun 1980 atas kebijakan pemerintah dengan tujuan membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam proyek yang didanai oleh APBN/APBD dan bantuan luar negeri. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian izin kepada lembaga keuangan non bank untuk menertibkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif pengganti Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.³⁹

Surety bond merupakan suatu produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya pengambilalihan potensi risiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak atas kepercayaan yang diberikannya pada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh mereka

Jaminan tertulis tersebut akan memberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh pihak asuransi selaku penjamin (*surety*) terhadap pihak penerima jaminan (*obligee/kreditur*) sebagai konsekuensi terhadap wanprestasi dari pihak yang dijamin (*principal/debitur*) tersebut. Kesuksesan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk penjaminan atau penanggungan tersebut akan sangat ditentukan oleh kepastian pembayaran oleh pihak asuransi itu sendiri sebagai guarantor atau yang lebih dikenal dengan *surety*.⁴⁰

³⁴ repository.uin-suska.ac.id/2938/1/2013_2013243IH.pdf diakses pada tanggal 23 Juni 2019, 11:25.

⁴⁰ <https://www.ikons.id/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 23 Juni 2019, 11:27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Asuransi Surety Bond adalah sebuah Produk Asuransi yang menjamin Pelaksana (*Principal*) dalam melaksanakan suatu proyek Pembangunan yang dimana Asuransi Surety ini akan menjamin segala bentuk kerugian kepada pemilik Proyek (*Obligee*) yang di lakukan bila Principal lalai atau Wanprestasi atas pelaksanaan suatu Proyek Pembangunan. Dalam melakukan penjaminan tersebut Pihak Pelaksana (*Principal*) akan mengajukan surat permohonan penjaminan kepada penjamin (*surety*) yang dimana Pihak Surety akan menilai serta mempertimbangkan apakah Permohonan tersebut diterima atau ditolak. Jika permohonan diterima maka pihak surety dan pihak principal akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jaminan pelaksanaan. Setelah kedua pihak yaitu Surety dan Principal menyetujui perjanjian penjaminan pelaksanaan tersebut maka pihak Surety akan menerbitkan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan. Dengan diterbitkan surat pernyataan keabsahan tersebut maka segala Penjaminan atas Principal akan di tanggung oleh Pihak surety. Kedua Surat yaitu Surat perjanjian Penjaminan Pelaksanaan serta Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan akan diberikan kepada Obligee sementara

sampai waktu pelaksanaan pembangunan tersebut selesai. Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan berlangsung Pihak Surety akan melakukan Monitoring 3 (tiga) bulan sekali melalui via telepon kepada Principal untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan proyek tersebut serta memastikan apakah pelaksanaan proyek tersebut berjalan lancar atau tidak. Dan setelah pembangunan selesai sesuai waktu yang di perjanjikan serta sesuai dengan Perjanjian antara Obligee dan Principal Maka Pihak *Obligee* menyerahkan Kembali kedua surat tersebut. Jika kedua surat tersebut telah di kembalikan maka penjaminan pelaksanaan tersebut telah selesai.

2. Penyelesaian Klaim apabila Principal melakukan wan prestasi dilakukan dengan cara Pihak *Obligee* mengajukan tuntutan penagihan dalam bentuk tertulis kepada *Obligee* setelah timbul cedera janji yang dilakukan oleh Principal. Setelah tuntutan ganti rugi dalam bentuk tertulis diberikan kepada surety maka pihak surety akan mencairkan dana dan diberikan kepada obligee sesuai dengan tuntutan kerugian yang diterakan pada tuntutan ganti rugi yang dibuat oleh pihak obligee Setelah ganti rugi di bayar Surety kepada Obligee maka Principal harus mengganti Kerugian tersebut kepada Principal 14 (empat belas) hari kalender sejak waktu perjanjian penjaminan pelaksanaan selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Untuk Pihak Surety perlu melakukan monitoring secara langsung kelokasi agar melihat dengan pasti pelaksanaan proyek tersebut.
2. Untuk Pihak Surety disaat terjadinya klaim meneliti kembali surat tuntutan ganti rugi yang diberikan oleh oblige apakah wanprestasi yang dilakukan oleh principal sesuai dengan apa yang di perjanjikan dan apakah besaran ganti rugi yang diterakan dalam tuntutan tersebut sudah sesuai dengan besar kerugian yang di lakukan oleh principal.
3. Untuk Pihak Principal setelah selesai pelaksanaan pembangunan perlu melakukan monitoring untuk memastikan kembali apakah pelaksanaan sudah selesai sesuai dengan perjanjian.
4. Untuk Principal perlu mengetahui serta memahami Hak dan Kewajiban Principal dalam perjanjian terhadap Obligee agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Anegraini Lysa. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pekanbaru: Suska Press
- Asyhadie Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Asyhadie Zaeni, Rahman Arif. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Harsono, Sri Redjeki, 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muhammad Abdulkadir, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika,
- Mulhadi, 2017. *Dasar – Dasar hukum asuransi*, Depok: rajawali,
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- PrakosoDjoko,2004. *Hukum Asuransi Indonesia*,Jakarta:PT Rineka Cipta,
- Sardjono Agus. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sasrawidjaja Suparman, 2003. *Aspek – Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung: P.T.. Alumni,
- Soedoso, R, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sunggono Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali pers
- Suratman, Dillah Phillips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Kansil,C.S.T.,Kansil,Christine S.T, 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafika,

Jurnal

- Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1840 Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 486/KMK.04/2000

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008

Dokumen

Dokumen PT ASEI, Kantor Cabang Pekanbaru, 2018

Surat Permohonan Kontra Bank Garansi Nomor:27/AKM.DIR/02/2018.

Surat Permohonan Kontra Bank Garansi Nomor:27/AKM.DIR/02/2018.

Surat Jaminan Pelaksanaan antara PT Asuransi Ekspor Indonesia dengan PT Andalas Karya Mulia

Hasil Wawancara Penulis dengan Retno Anggraini, Sekertaris dari PT Asuransi Ekspor Indonesia pada hari 08 Juli 2019, Pukul 02:20

Internet

www.Asei.co.id diakses pada 18 juni 2018, 21:15

eprints.uny.ac.id/18666/4/4.%20Bab%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019,07:05

repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 30 July 2019,07:08

<https://www.notarisdanppat.com> › Hukum & Notaris diakses tanggal 31 July 2019,03:05

<https://prolegal.id/2017/02/14/apa-saja-hak-dan-kewajiban-direksi/>diaksespada tanggal 31 July 2019,03:11

<https://www.maxmanroe.com/.../bisnis/pengertian-badan-usaha.htm...> diakses pada tanggal 31 July 2019, 02:30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.101/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI KREDIT DAN SURETYSHIP (Studi Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018 yang ditulis oleh :

Nama : Dian Perdana
NIM : 11527100011
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2018
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH
Sekretaris
Musrifah, SH, MH
Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA
Penguji II
Peri pirmansyah, SH., MH

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DIAN PERDANA**
 NIM : **11527100011**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Judul : **PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.101/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA ASURANSI KREDIT DAN SURETYSHIP (Studi Jaminan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018)**

Pembimbing : **Syafrinaldi, SH, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN SURETY BOND OLEH PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.010/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN LINI USAHA KREDIT DAN SURETYSHIP (Studi Jaminan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru), ditulis oleh saudara :

Nama : DIAN PERDANA
NIM : 11527100011
Program Studi / : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 27 Maret 2019
Narasumber : PERI PIRMANSYAH, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2019

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber

ASFENDI, S.Ag.M.Si
NIP. 19610918 198803 1 002

PERI PIRMANSYAH, SH, MH
NIK. 130 217 120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23824
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5624/2019 Tanggal 28 Juni 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

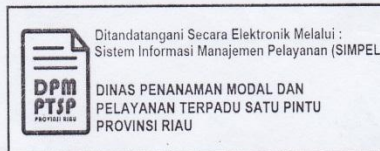
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DIAN PERDANA |
| 2. NIM / KTP | : 11527100011 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN ASURANSI SURETY BOND PADA PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 124/KMK.101/2008 TENTANG PELAKSANAAN ASURANSI SURETYHIP (STUDI JAMINAN PROYEK PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. Asuransi Ekspor Indonesia
- ③ 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A Subsidiary of IndonesiaRe



SURAT KETERANGAN
Nomor: 06/961/VII/ASEI/PKBR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMAY TATY
Jabatan : Branch Manager

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Dian Perdana
NIM : 11527100011
Judul : Pelaksanaan surety bond oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia kota pekanbaru berdasarkan peraturan menteri keuangan no 124/pmk. 101/2008 tentang lini usaha asuransi kredit dan suretyship (study jaminan pelaksanaan pembangunan tahun 2008).

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan / data / informasi dan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Juli 2019


asuransi Asei
Kantor Cabang Pekanbaru

JUMAY TATY
Branch Manager

PT. Asuransi Asei Indonesia

Gedung Menara Kadin Indonesia
Lt. 21 & 22
Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950

t. +62 21 5790 3535
f. +62 21 5790 4031, 5790 4032
e. aseil@asei.co.id
w. www.asei.co.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Aek Kanopan Sumatra Utara tanggal 27 September 1997 dari Ayah yang bernama Aruansyah Aruan dan Ibu yang bernama Arwanizar Harahap. Penulis merupakan Anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis memulai pendidikann Sekolah Dasar di SD Negeri 112279 kualuh hulu pada tahun 2002 s/d 2005 dan melanjutkan di Sekolah Dasar di SD Negeri 013 Bagan Sinembah hingga lulus pada tahun 2009. Kemudian Penukis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Bagan Sinembah dan tamat pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikannya di MA Negeri Rantau Prapat dan lulu pada tahun 2015. Setelah tamat MA, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Study S1 Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum. pada tanggal 15 Oktober 2019 Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu selama empat tahun setengah.

Berkat rahmat Allah SWT, dan iringan doa dari orang tua dan saudara, keluarga, dan dukungan dukungan dari teman seperjuangan , sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Surety Bond oleh PT Asuransi Eksplor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.101/2008 Tentang Lini Usaha Asuransi Kredit Dan Suretyship (Studi Jaminan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018)” dan berhasil memperoleh gelar Sarjana

UIN SUSKA RIAU